

ABSTRACT

Islamic Economy Perspective in The Acceptance of Increase Non Tax (AINT) Police of Republic Indonesia 2017

Every country cannot free from ta leived as the acceptance source to increase and developed the economy part of country. In Indonesia, one of country income getting from AINT that get from society. The tax that get from the society based on the Indonesian law norm. The law can change wherever appropriate with the government discussion with high thinking so that have good impact for country and society. Indonesia is not islamic country, that's why it depends on Undang-Undang and pancasila as Bineka Tunggal Ika. Thinking about government regulation about the increase of AINT payment, that is natural condision in a country. How about in islamic perspective? Is it fair? Based on theproblem, the researcher interested to know and analyzed Islamic Economy Perspective in The Acceptance of Increase Non Tax (AINT). This research have purpose to answer the question: How Islamic Economy Perspective in The Acceptance of Increase non Tax (AINT) police of Republic Indonesia?

This research is kind of qualitative research with normative and library aproach. The data of the research uses data sekunder, the writer get from many literature that can help to complete the research data and give additional information such as book, magazine, article journal, archives and etc.

The result of this research show that the increase of non tax acceptance of Republic of Indonesia 2017 appropriate with tax in the islamic economy. It can see from the islamic tax regulation such as; determaining tax increase cannot pass for payment, the acceptance of tax to society and the tax leived same as society condition.

Keyword: islamic economy, The Acceptance of Country non Tax.

ABSTRAK

Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Kenaikan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kepolisian Negara Republik Indonesia Tahun 2017

Setiap negara tidak lepas dari pungutan pajak sebagai sumber penerimaan negara guna untuk meningkatkan atau mengatasi prekonomian yang ada didalam negara tersebut. Di Indonesia salah satu penerimaan negara didapat dari PNBP yang dipungut dari rakyat yang bersangkutan, tentu pungutan tersebut berdasarkan norma-norma hukum yang berlaku. Norma-norma hukum di Indonesia kapanpun bisa berubah sesuai dengan musyawarah pemerintah tentu dengan mempertimbangkan secermat mungkin supaya berdampak kebaikan bagi negara maupun masyarakatnya. Negara Indonesia bukanlah negara islam sehingga berpanutan pada Undang-Undang dan pancasila sebagai Beneka Tunggal Ika. Mengingat kebijakan pemerintah mengenai hal kenaikan tarif PNBP tentu hal itu wajar dipandang dari satu sisi negara. Namun bagaimana jika dipandang dari sisi Islam apakah hal tersebut adil atau wajar? Dari permasalahan tersebut peneliti tertarik untuk mengetahui dan menganalisa Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Kenaikan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan: Bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap kenaikan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) kepolisian negara Republik Indonesia 2017?

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan norrmatif dan pendekatan kepustakaan. Data dari penelitian ini hanya data sekunder yang digunakan, penulis mengambil dari berbagai literatur yang dapat membantu dalam melengkapi data penelitian ini dan adapat memberikan informasi tambahan misalnya buku, majalah, jurnal artikel, arsip dan lain-lain sebagainya.

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa bahwa kenaikan tarif penerimaan negara bukan pajak kepolisian negara Indonesia tahun 2017 telah sesuai dengan esensi pajak dalam ekonomi Islam. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan pajak dalam Islam seperti; Penentuan kenaikan pajak yang tidak melampaui untuk membayar, alokasi penerimaan pajak yang diperuntukan untuk kemaslahatan umat dan besaran pungutan pajak besaran yang sesuai ketentuan umat.

Kata Kunci : ekonomi islam, tarif, Penerimaan Negara Bukan Pjak

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	v
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	vi
ABSTRACT	vii
ABSTRAK	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
MOTTO	xi
HALAMAN PERSEMBAHAN	xii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Kajian Pustaka.....	8
E. Metode Penelitian.....	9
F. Sistematika Pembahasan	12
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Penerimaan Negara	
1. Penerimaan perpajakan	15
2. Hibah.....	16

B. Perpajakan Menurut Islam

1. Definisi Pajak Menurut Syariah dan Karakteristiknya.....17
2. Landasan Teori Tentang Perpajakan 20
3. Penerimaan dan pendapatan dari perspektif sejarah Islam 26
4. Penerimaan negara dalam Islam.....41
5. Penerimaan Negara Bukan Pajak dalam Islam 47

C. Masalah Mursalah

1. Pengertian masalah mursalah.....45
2. Macam-macam masalah.....50

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sistem Perpajakan Indonesia

1. Pengertian Pajak dan Syarat Pungutan Pajak.....53
2. Pajak Pusat dan Pajak Daerah 55
3. Fungsi pajak dan asas pungutannya 57
4. Sistem pungutan pajak dan tarif pajak 59

B. Gambaran Umum PNB

1. Pengertian dan fungsi PNB 61
2. Jenis dan tarif PNB 66
3. Pengelolaan PNB 69

C. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

1. Pengertian pajak kendaraan bermotor 70
2. Dasar hukum pajak kendaraan bermotor.....70
3. Objek dan wajib pajak kendaraan bermotor.....71

D. Perbandingan Kenaikan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kendaraan Bermotor pada Tahun 2010 dan 2017.....	71
E. Ketetapan Biaya dan alasan-alasan Kenaikan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak	73
F. Teori Dasar yang Melatar Belakangi Penentuan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	79

BAB IV TINJAUAN EKONOMI ISLAM TERHADAP BIAYA KENAIKAN TARIF PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

A. Pajak menurut syariah.....	81
-------------------------------	----

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	94
B. Saran.....	94

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 1: Kenaikan Tarif STNK dan BPKB 2017	6
Tabel 2: Pengeluaran negara dimasa pemerintahan Rasulullah SAW	38
Tabel 3: Klasifikasi pendapatan negara dimasa Umar bin Khattab	43
Tabel 4: Pengeluaran tunjangan pada masa Umar bin Khattab	43
Tabel 5: Perbandingan tarif lama dan tarif baru PNBP kendaraan bermotor	76

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Peraturan Pemerintah. No. 60 Tahun 2016

Lampiran 2: Peraturan Pemerintah. No. 50 Tahun 2010

Lampiran 3: Undang-Undang No. 20 Tahun 1997

Lampiran 4: Brosur Pelayanan Kendaraan Bermotor

Lampiran 3: Pedoman Wawancara